

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**
(Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)



Oleh:

PEGGY SANDE

00378/2008

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Wisuda Periode Maret 2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)**

PEGGY SANDE

**Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode Maret
2013 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.**

Padang, Februari 2013

Pembimbing I



Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak
NIP. 19580519 199001 1 001

Pembimbing II



Deviani, SE, M.Si, Ak
NIP. 19690610 199802 2 001

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN
KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**
(Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)

Peggy Sande

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : peggy_sande@yahoo.com

Abstract

Accountability of a province financial management is processes of finance started from plan, action, report, responsibility and supervise which can be really reported and been responsible to society and DPRD (Representatives of province). The kind of this research is a causative research. The population of the research is SKPD in Provincial Government of West Sumatera. Data those are used are primer data. Technique of collecting data is survey with sharing questioner. The researcher uses double regression analysis by using f-test and t-test. In this research, the researcher aims at findings 1) the effect of presenting financial report to accountability of financial management of a province, 2) the effect of accessibility of financial report to accountability of financial management of a province. The result of the research shows that: 1) the presenting of financial report influences significantly to accountability of financial management of the province, 2) accessibility of financial report has positive significance to accountability of financial management of the province. Based in the result, it is suggested that all the institutions in West Sumatera Government can improve the presenting of financial report and accessibility of financial report in order to improve accountability of financial management of the province.

Key words: accountability of a province financial management, the presenting of financial report, accessibility of financial report.

Abstrak

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data dengan teknik survei dengan menyebarkan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda, uji f dan uji t. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui, 1) pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, 2) pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa: 1) Penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, 2) Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu disarankan bagi seluruh instansi pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar dapat meningkatkan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan agar akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat terus ditingkatkan.

Kata kunci : akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Halim, 2007).

Pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Mulyana, 2006).

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan (Bastian, 2006). Sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan

keuangannya. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordiawan, 2010). Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Mulyana, 2006). Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2002).

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet dalam Mulyana, 2006).

Namun dalam kenyataannya, BPK menemukan masih banyak permasalahan pada pengelolaan keuangan pemerintah

Provinsi Sumatera Barat yang menunjukkan lemahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. BPK juga menemukan masih banyak permasalahan pada penyajian laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Di samping itu, pemerintah Provinsi Sumatera barat juga belum mampu menyediakan semua informasi keuangan secara terbuka kepada publik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui pengaruh dari penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (studi empiris pada pemerintah Provinsi Sumatera Barat). Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan dapat juga dijadikan sebagai bahan referensi atau bukti empiris bagi penelitian selanjutnya.

TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan

pengelolaan keuangan daerah tersebut (Halim : 2006).

Menurut LAN dalam Akuntabilitas dan *Good Governance* (2000), akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah daerah.

Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh *agent* yang independen. Anggaran tahunan secara khusus mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan untuk melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkat operasi (Shende dan Bennet, 2004).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 (Pasal 1), keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Bila dilihat dari ruang lingkupnya, keuangan daerah meliputi kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya. Kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah meliputi APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya meliputi badan-badan usaha milik daerah (Halim, 2007).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur.

Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2002).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unit pemerintahan pengguna anggaran yang diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabung pada entitas pelaporan. SKPD selaku pengguna anggaran harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya. Hal ini berarti bahwa setiap SKPD harus membuat laporan keuangan unit kerja. Laporan keuangan yang harus dibuat setiap unit kerja adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Tujuan Penyajian Laporan Keuangan

Menurut Nordiawan (2010), tujuan penyajian laporan keuangan adalah: 1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran 2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut Bastian (2006), terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu: 1) relevan yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi kebutuhan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini 2) Andal yaitu laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diferivikasi 3) Dapat dibandingkan yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau entitas pelaporan lain pada umumnya 4) Dapat dipahami yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mengetahui isi yang dimaksud dalam laporan keuangan.

Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Koester, 2002 dalam Rohman, 2009). Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Mulyana, 2006). Laporan keuangan harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya (Henly *et al*, 1992, dalam Rohman, 2009).

Menurut Mardiasmo (2002), laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability dan stewardship*).

Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2002). Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan *website*

(internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, 2004, dalam Mulyana, 2006).

Menurut Yani (2009), pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggungjawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komperhensif kepada masyarakat luas termasuk informasi keuangan daerah. Dengan kemajuan teknologi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan memberdayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). SIKD adalah sistem informasi terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat (UU No. 33 Tahun 2004). Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet atau cara lainnya (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Dengan demikian pemerintah daerah harus memenuhi: 1) Keterbukaan yaitu laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa 2) Kemudahan yaitu pemerintah daerah harus memberikan kemudahan kepada *stakeholder* dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah 3) *Accesible* yaitu masyarakat dapat mengakses laporan

keuangan pemerintah daerah melalui internet (*website*).

Pemakai Laporan Keuangan

Serikat dagang sektor publik GASB (1999) dalam Mardiasmo (2002) mengidentifikasi pemakai laporan keuangan pemerintah menjadi tiga kelompok besar, yaitu: 1) Masyarakat 2) Legislatif dan Badan Pengawasan 3) Investor dan Kreditor.

Hubungan Antar Variabel

Hubungan penyajian laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordian, 2010). Berarti semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap

peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hubungan aksesibilitas laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, *website* (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet dalam Mulyana, 2006).

Pemerintah daerah harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. Apalah artinya menyajikan laporan keuangan dengan baik tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan dengan baik. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik.

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2006). Untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah harus menyampaikan

laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada masyarakat secara terbuka dengan mengembangkan sistem informasi keuangan daerah. Berarti dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan bagi para pengguna akan menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Hipotesis Penelitian

H₁ : Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

H₂ : Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD di lingkungan Pemerintah provinsi Sumatera Barat dengan responden Kepala SKPD dan Kepala Bagian Keuangan SKPD. Pemilihan sampel dengan metode *total sampling*. Jumlah sampel penelitian adalah sebanyak 92 orang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden penelitian.

Variabel penelitian yang digunakan adalah :

- 1) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (*dependent variabel*) : proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD.

- 2) Penyajian Laporan Keuangan (*independent variabel*) : penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas laporan Keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.
- 3) Aksesibilitas Laporan Keuangan (*independent variabel*) : kemudahan berbagai pihak pengguna laporan keuangan untuk mengetahui informasi keuangan daerah melalui media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (internet).

Variabel penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert dengan lima alternatif jawaban dan masing-masing diberi skor yaitu: Selalu (SL), Sering (SR), Kadang-kadang (KK), Jarang (JR), Tidak Pernah (TP). Uji Asumsi Klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data penelitian adalah : Koefisien Determinasi yang disesuaikan (*adjusted R²*).

Analisis Regresi Berganda

Alat analisis regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
a = Konstanta

- $b_{1,2}$ = Koefisien regresi dari variabel independen
- X_1 = Penyajian Laporan Keuangan
- X_2 = Aksesibilitas Laporan Keuangan
- e = *error term*

Uji F (F-Test)

Uji F dilakukan bertujuan untuk menguji apakah hasil analisis regresi berganda modelnya sudah *fix* atau belum dan untuk dapat mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat secara keseluruhan atau secara simultan. Patokan yang digunakan dalam pengujian ini adalah membandingkan nilai *sig* yang diperoleh dengan derajat signifikansi pada level $\alpha = 0,05$. Apabila nilai *sig* yang diperoleh lebih kecil dari derajat signifikansi maka model yang digunakan sudah *fix*.

Uji Hipotesis (t-test)

Tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau $(\alpha) = 0,05$ (5%).

Dengan kriteria sebagai berikut: Jika tingkat signifikan $< 0,05$ dan koefisien regresi (β) positif maka hipotesis diterima yang berarti tersedia cukup bukti untuk menolak H_0 pada pengujian hipotesis 1 dan 2 atau dengan kata lain tersedia bukti untuk menerima H_1 dan H_2 . Jika tingkat signifikan $< 0,05$ dan koefisien regresi (β) negatif maka hipotesis ditolak dan berarti tidak tersedia cukup bukti untuk menerima hipotesis. Jika tingkat signifikan $> 0,05$ dan koefisien regresi (β) positif maka hipotesis ditolak yang berarti tidak tersedia cukup bukti untuk menerima hipotesis.

HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $N = 82$, adalah 0,1829. Dari hasil olahan data untuk yang dapat dilihat pada tabel 1 (lampiran), semua instrumen penelitian dinyatakan valid.

Untuk uji reliabilitas instrumen, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,7 bisa diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik. Dari hasil olahan data yang dapat dilihat pada tabel 2 (lampiran), semua instrumen nilainya berada pada kisaran di atas 0,6, jadi semua instrument penelitian dapat dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

- Uji normalitas
Dari tabel 3 (lampiran) terlihat bahwa hasil uji normalitas menyatakan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,630 dengan signifikan 0,822 dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal.
- Uji multikolinearitas
Dari tabel 4 (lampiran) diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan *tolerance value* berada diatas 0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.

- Uji heteroskedastisitas
Berdasarkan tabel 5 (lampiran), dapat dilihat tidak ada variabel yang signifikan dalam regresi dengan variabel AbsUt. Tingkat signifikansi $> 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi bertujuan untuk melihat atau mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil pengukuran koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 6 (lampiran).

Dari tampilan *output SPSS model summary* pada tabel 6 di atas besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,202. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan adalah sebesar 20,20%, sedangkan 79,80% lainnya ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

Koefisien Regresi

Hasil pengolahan data yang menjadi dasar dalam pembentukan model penelitian ini ditunjukkan dalam tabel 7 (lampiran). Berdasarkan tabel 7 dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 18,380 + 0,263 X_1 + 0,581 X_2 + e$$

Keterangan :

- Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- a = Konstanta
- X_1 = Penyajian Laporan Keuangan
- X_2 = Aksesibilitas Laporan Keuangan

e = Standar error

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Nilai konstanta sebesar 18,380 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan adalah nol maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar konstanta 18,380.
- b. Koefisien penyajian laporan keuangan sebesar 0,263 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan penyajian laporan keuangan satu satuan akan mengakibatkan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,263 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.
- c. Koefisien aksesibilitas laporan keuangan sebesar 0,581 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan aksesibilitas laporan keuangan, maka akan mengakibatkan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah SKPD sebesar 0,581 dengan asumsi variabel lain konstan.

Uji F (*F-Test*)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak. Hasil uji F dapat dilihat dalam tabel 8 (lampiran).

Dari hasil analisis data yang diperoleh mengenai penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah dapat dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan. Dari hasil pengujian juga dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pembahasan

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya. Seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan komersial, informasi berupa laporan keuangan seharusnya merupakan hasil dari sebuah proses akuntansi. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan menciptakan akuntabilitas (Nordriawan, 2010).

Penyajian laporan keuangan yang baik adalah salah satu faktor untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang diterima umum. Laporan keuangan yang wajib dibuat oleh pemerintah daerah adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan atas laporan keuangan merupakan elemen penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berarti semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Mulyana (2006) yang menyatakan bahwa salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah dengan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah secara lengkap dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2009), yang meneliti tentang pengaruh penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial penyajian neraca SKPD berpengaruh signifikan dan positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD.

Jadi dengan adanya penyajian laporan keuangan yang baik, yang memenuhi karakteristik laporan keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi kelalaian dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2006). Untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada masyarakat dengan mengembangkan sistem informasi keuangan daerah.

Selain menyajikan laporan keuangan, hal lain yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan akses laporan keuangan bagi para pengguna laporan keuangan. Alasannya adalah apabila artinya menyajikan laporan keuangan tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan maksimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Mulyana (2006) yang meneliti tentang pengaruh penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2009), yang meneliti tentang pengaruh penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD. Hasil penelitian menunjukkan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD.

Jadi dengan memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan maka akan memungkinkan berjalannya

fungsi kontrol yang baik terhadap pertanggungjawaban penggunaan aset daerah maupun kontrol terhadap kebijakan-kebijakan keuangan yang diambil pemerintah, baik kontrol yang dilakukan oleh badan pemeriksa, masyarakat maupun investor. Dengan adanya kontrol yang baik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Keterbatasan

1. Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan.
2. Penelitian ini masih terbatas pada pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Penelitian ini hanya terbatas pada SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam mengumpulkan data dapat dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis, penggantian teknik pengambilan sampel penelitian serta dilakukan perubahan dalam pemilihan alternatif jawaban pada kuesioner penelitian. Selain itu juga dapat memperluas sampel dan lokasi penelitiannya agar hasil penelitian nantinya dapat digeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharmi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bandariy, Himmah. 2011. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah*. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
-, 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Diamond, Jack. 2002. *Performance Budgeting-Is Accrual Accounting Required?*. IMF Working Paper. Fiscal Affairs Department.
- Domai, Tjahjanulin. 2002. *Buku Ajar Administrasi Keuangan Daerah*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
-, 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Henley, D. A, Likierman. J. Perrin, M. Svans, I. Lapsley, & J. Whiteoak. 1992. *Public Sector Accounting and Financial Control Fourth Edition*. Chapman & Hall.
- LAN. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Erlangga.
- Mahsun, Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFY.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mulyana, Budi. 2006. *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*.
- Nasution, Saufi Iqbal. 2009. *Pengaruh Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi. USU.
- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

..... No. 24
Tahun 2005 Tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah

Rohman, Abdul. 2009. *Pengaruh
Implementasi Sistem Akuntansi,
Pengelolaan Keuangan Daerah
Terhadap Fungsi Pengawasan dan
Kinerja Pemerintah daerah (Survey
Pada Pemda di Jawa Tengah)*,
Jurnal Akuntansi. Universitas
Sebelas Maret. Surakarta.

Sedarmayanti. 2004. *Good Governance
(Kepemerintahan Yang Baik)*,
Bandung: Msandar Maju.

Shende, Suresh dan Tony Bennet. 2004.
*Concept Paper 2: Transparency and
Accountability in Public Financial
Administration*. UN DESA.

Situs Resmi Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat. www.Sumbarprov.go.id

Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada.

Lampiran

KUESIONER

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS
LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

BAGIAN PENDAHULUAN

IDENTITAS RESPONDEN

- Nama :
- Umur : Tahun
- Jenis Kelamin : Perempuan Laki-Laki
- Nama SKPD :
- Jabatan : Kepala SKPD
 Kabag Keuangan
- Pendidikan Terakhir : SLTA D3 S1
 S2 Lainnya
- Masa Kerja : <5 Tahun 5-10 Tahun
 >10 Tahun

BAGIAN ISI

Petunjuk : Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda cek list () pada salah satu pilihan jawaban sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan yang diberikan.

- Pilihan jawaban : SS : Sangat Setuju
S : Setuju
RR : Ragu-Ragu
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

No.	PERNYATAAN	SS	S	RR	TS	STS
1	APBD disusun dengan pendekatan kinerja					
2	Pemerintah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan					
3	Jika ada perubahan, APBD ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir					
4	Pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku					
5	Pelaporan keuangan daerah dibuat dalam bentuk laporan keuangan					
6	Laporan keuangan SKPD di review oleh inspektorat sebelum diserahkan kepada BPK					
7	Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan					
8	Dilakukannya <i>financial audit</i> terhadap laporan keuangan daerah					

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

No.	PERNYATAAN	SS	S	RR	TS	STS
1	SKPD mampu menyusun laporan keuangan secara lengkap (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan).					
2	SKPD mampu menyelesaikan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan) tepat waktu.					
3	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD telah menggambarkan dengan jujur transaksi yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.					
4	Apabila dilakukan pengujian terhadap laporan keuangan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.					
5	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					
6	Laporan keuangan yang disusun oleh SKPD telah dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.					
7	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD bebas dari kesalahan yang bersifat material.					
8	Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan SKPD memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan.					

AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN

No.	PERNYATAAN	SS	S	RR	TS	STS
1	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.					
2	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.					
3	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (<i>website</i>)					

BAGIAN PENUTUP

Atas bantuan Bapak/Ibu mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Peggy Sande

00378/2008

Uji Validitas

Tabel 1
Nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil

Instrumen Variabel	Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> terkecil
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,388
Penyajian laporan Keuangan (X ₁)	0,348
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X ₂)	0,482

Sumber: Pengolahan data 18statistic SPSS versi 15 (2012)

Uji Reliabilitas

Tabel 2
Nilai *Cronbach's Alpha*

Instrumen Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,835
Penyajian Laporan Keuangan (X ₁)	0,868
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X ₂)	0,747

Sumber: Pengolahan data statistik SPSS versi 15 (2012)

Uji Normalitas

Tabel 3
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		82
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,77663723
Most Extreme Differences	Absolute	,070
	Positive	,061
	Negative	-,070
Kolmogorov-Smirnov Z		,630
Asymp. Sig. (2-tailed)		,822

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

Sumber: Pengolahan data statistik SPSS versi 15 (2012)

Uji Multikolinearitas

Tabel 4
Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	,992	1,008
	X2	,992	1,008

a Dependent Variable: Y

Sumber: Pengolahan data statistik SPSS versi 15 (2012)

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	1,226	2,204		,556	,580
	X1	,004	,037	,013	,119	,906
	X2	,069	,147	,053	,468	,641

a Dependent Variable: AbsUt

Sumber: Pengolahan data statistik SPSS versi 15 (2012)

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 6
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,471(a)	,222	,202	2,812

a Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Pengolahan data statistik SPSS versi 15 (2012)

Uji Analisis Regresi Berganda

Tabel 7
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	18,380	3,893		4,721	,000
	X1	,263	,066	,396	3,975	,000
	X2	,581	,260	,223	2,234	,028

a Dependent Variable: Y

Sumber: Pengolahan data statistik SPSS versi 15 (2012)

Uji F Statistik

Tabel 8
ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	178,062	2	89,031	11,263	,000(a)
	Residual	624,487	79	7,905		
	Total	802,549	81			

a Predictors: (Constant), X2, X1

b Dependent Variable: Y

Sumber: Pengolahan data statistik SPSS versi 15 (2012)